

**Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Perumahan Dan Permukiman Yang
Berada Di Sempadan Sungai Bengawan Solo
(Studi Di Kabupaten Bojonegoro)**

Shelvy Wedha Indrawati, Bambang Sugiri, Abdul Madjid

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: Shelvie.wedha@yahoo.co.id

Abstrak

Keberadaan perumahan dan permukiman yang berada di Sempadan Sungai Bengawan Solo yang rawan berpotensi bencana mengakibatkan rumah penduduk selalu direndam banjir jika turun hujan dan debit air sungai naik. Tidak terlepas dari bencana alam saja larangan mendirikan bangunan juga di atur dalam pasal 157 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Batasan masalah yang dikaji adalah penegakan sanksi pidana dan kendala penegakan sanksi pidana terhadap perumahan dan permukiman yang berada di Sempadan Sungai Bengawan Solo Kabupaten Bojonegoro yang berpotensi menimbulkan bencana. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis penegakan sanksi pidana dan kendala penegakan sanksi pidana terhadap perumahan dan permukiman yang berada di Sempadan Sungai Bengawan Solo yang berpotensi menimbulkan bencana. Hal ini menjadi pekerjaan bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk memberikan solusi bagi penduduk yang berada dan bermukim di Sempadan Sungai Bengawan Solo. Dengan demikian upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu adalah membuat kebijakan yang melarang adanya bangunan dan permukiman di Sempadan Sungai Bengawan Solo, melakukan koordinasi dan sosialisai antara Pemerintah Daerah dan Aparat penegak hukum, melakukan sosialisasi terkait ancaman bencana banjir Sungai Bengawan Solo yang terjadi sewaktu-waktu khususnya pada daerah rawan bencana, membentuk personil penegak hukum di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, melakukan pengawasan dan memonitoring terhadap pemanfaatan lahan di Sempadan Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro.

Kata Kunci : penegakan sanksi pidana, perumahan dan permukiman, Sempadan Sungai Bengawan Solo

The Enforcement of Criminal Sanctions Against The Housing And Settlements Located On The Border Of The Bengawan Solo River

(Studies in Bojonegoro)

Shelvy Wedha Indrawati, Dr. Bambang Sugiri , Abdul Madjid

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: Shelvie.wedha@yahoo.co.id

Abstract

The existence of housing and residential who in border river bengawan solo gristle potentially catastrophic results in houses always soaked flood when rain comes and the discharge of water ascends rivers. Not separated from natural disasters course prohibition of erecting buildings also operated in article 157 the law number 1 year 2011 about housing and residential areas. The limits of a problem that review is enforcements criminal sanctions and constraint enforcements criminal sanctions against housing and residential who was in border river bengawan solo district bojonegoro potentially calamity shall rise. The purpose of this research is to find out and analyze the enforcement of criminal sanction and enforcement of criminal sanctions against the constraints of housing and settlements located on the border of the river Bengawan Solo that could potentiakky pose a disaster. This is a job for the Government District of Bojonegoro to provide solution for people who are living at the border of the Bengawan Solo river. Thus efforts should be done by the County Government Provides that are making a policy that prohibits the presence of buildings and settlements at the border of the river Bengawan Solo, doing sosialisai and coordination between local governments and law enforcement agencies, conduct related socialization threat Solo river flooding disaster that occurred at any time, especially in the area of disaster-prone law enforcement personnel, forming in the field of housing and The Permukiman, to conduct surveillance and to monitor land use in the Sempdan Solo River in Bojonegoro Regency.

Keywords : The enforcement of criminal sanctions, housing and residential, river border bengawan solo

A. Pendahuluan

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan kehidupan, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu maka upaya pembangunan perumahan dan permukiman terus ditingkatkan untuk menyediakan perumahan dengan jumlah yang semakin meningkat.¹

Banyaknya permukiman di Sempadan Sungai Bengawan Solo dikarenakan adanya himpitan ekonomi, dan kurangnya lahan yang akan dihuni oleh penduduk yang berkembang pesat. Banyak terdapat bahaya jika bermukim di sempadan Sungai Bengawan Solo yaitu meliputi banjir, longsor, pencemaran sungai karena pembuangan sampah, pencemaran sungai karena air limbah bekas penduduk sekitar dan dapat mengakibatkan rusaknya sistem drainase. Permasalahan utama yang dihadapi oleh permukiman pada daerah aliran Sungai Bengawan Solo adalah banjir. Pada tahun 2007 terjadi banjir bandang besar pada daerah aliran Sungai Bengawan Solo yang hampir menggenangi seluruh wilayah Kecamatan Bojonegoro. Banjir pada akhir tahun 2007 merupakan banjir terbesar setelah tahun 1966, terdapat 15 dari 27 kecamatan di Bojonegoro yang tergenang banjir selama 10 hari dengan ketinggian diatas 1,5 meter.²

Adanya permukiman di Sempadan Sungai Bengawan Solo Kecamatan Bojonegoro, dikarenakan pesatnya pertumbuhan penduduk yang menyebabkan permintaan terhadap permukiman semakin besar. Inilah yang menyebabkan tumbuhnya permukiman di bantaran Sungai Bengawan Solo Kecamatan Bojonegoro. Saat ini di sepanjang Sungai Bengawan Solo tepatnya di Kecamatan Bojonegoro terdapat kurang lebih 1300 bangunan yang menempati daerah sempadan sungai

¹ Andi Hamzah, I Wayan Suandra, dan B.A Manalu, **Dasar-dasar Hukum Perumahan**, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm: 1

² Rohman Taufiq, **Banjir Bojonegoro Banjir Terbesar Tahun Ini**, 2007, (Online), <http://www.tempo.co/read/news/2007/12/30/058114460/>, diakses tanggal 1 Maret 2013

dengan jarak dari bibir sungai sampai tanggul kurang lebih 0-20 meter.³ Daerah permukiman yang hanya memiliki jarak kurang lebih 1-5 meter dari bibir sungai dan menjadi daerah rawan banjir setiap tahunnya.

Permukiman liar itu dibiarkan berdiri kokoh di bantaran sungai bengawan solo dan pemerintahpun tidak bertindak tegas padahal telah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2031 pada pasal 22 ayat (1) dan (2) yang membahas tentang penetapan kawasan sempadan sungai, berbunyi:

- (1). Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, terdiri atas :
 - a. kawasan sempadan sungai;
 - b. kawasan sekitar waduk;
 - c. kawasan sekitar embung;
 - d. Kawasan sempadan jaringan irigasi; dan
 - e. kawasan sempadan sumber mata air.
- (2). Penetapan kawasan sempadan sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 - b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
 - c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, juga mengatur tentang standar kriteria perumahan dan permukiman, serta diatur pula ketentuan pidananya, yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 140, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

³ Bappenas, **Identifikasi Masalah Pengelolaan Sumber Daya Air Di Pulau Jawa**, Direktorat Aparatur Negara, Jakarta, 2006, hlm: 23

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang telah disebutkan pada pasal 5 ayat 2, yaitu:

“Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya”

Pada penjelasan pasal diatas disebutkan yang dimaksud kawasan perlindungan adalah kawasan sempadan sungai. Pada hal ini sempadan sungai yang dimaksud disini oleh peneliti adalah Sempadan Sungai Bengawan Solo yang berada di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini jelas melanggar tentang penataan ruang, rumah yang seharusnya berada pada zona aman, tetapi malah berada pada zona yang rawan bencana.

Bila melanggar ketentuan yang di terapkan dalam pasal-pasal tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuannya. Jika memang terjadi kesalahan pada permukiman yang berdiri di bantaran sungai bengawan solo maka harus di tertibkan dan ditegakan, dengan kata lain menerapkan sanksi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, peraturan penggunaan ancaman sanksi pidana diatur pada pasal 157.

Penegakan sanksi pidana pada pasal 157 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ini perlu diterapkan terhadap perumahan dan permukiman yang berada di Sempadan Sungai Bengawan Solo karena memang jelas telah melanggar ketentuan yang berada di dalam undang-undang tersebut. Pada hal ini sudah adanya peraturan yang mengatur di dalam undang-undang tetapi pada kenyataannya belum diterpakan sanksi terhadap perumahan dan permukiman yang berada di sempadan sungai bengawan solo. Untuk itu penulis akan meneliti tentang Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Perumahan dan Permukiman Yang Berada di Sempadan Sungai Bengawan Solo, yang perlu adanya penegakan dan penertiban.

B. Masalah/ Isu Hukum

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan sanksi pidana terhadap perumahan dan permukiman yang berada di Sempadan Sungai Bengawan Solo Kabupaten Bojonegoro yang berpotensi menimbulkan bencana?
2. Apa kendala penegakan sanksi pidana terhadap perumahan dan permukiman yang berada di Sempadan Sungai Bengawan Solo Kabupaten Bojonegoro yang berpotensi menimbulkan bencana?

C. Pembahasan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bojonegoro yang meliputi dinas-dinas terkait dengan penelitian yaitu di Polres Bojonegoro, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Bojonegoro, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bojonegoro, Badan Perijinan Kabupaten Bojonegoro, serta di perumahan dan permukiman yang berada pada daerah sempadan bengawan solo. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini adalah adanya permukiman yang berada di sepanjang sempadan sungai bengawan Solo di Kecamatan Bojonegoro, yang sebenarnya tidak boleh ada permukiman yang berada di dalam tanggul sungai bengawan solo, karena sudah diatur di dalam Perda Kabupaten Bojonegoro No.26 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sedangkan pada kenyataanya ada permukiman yang berdiri di dalam tanggul sungai bengawan solo yang masuk kriteria daerah rawan bencana, di Kecamatan Bojonegoro, yang mengakibatkan banjir pada setiap tahunnya dan mengakibatkan longsor. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, selain itu juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari perundang undangan, buku, dan internet. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik secara deskriptif kualitatif.

1. Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Perumahan dan Permukiman yang Berada di Sempadan Sungai Bengawan Solo Kabupaten Bojonegoro yang Berpotensi Menimbulkan Bencana

Terdapat 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Bojonegoro yang berada di sepanjang tepian Sungai Bengawan Solo yang selalu menjadi langganan banjir luapan dari Sungai Bengawan Solo. Bencana alam selanjutnya adalah bencana tanah longsor yang terjadi akibat meluapnya aliran sungai dan terjadinya illegal logging yang menyebabkan terjadinya longsor di sekitar daerah tersebut, terjadi di 13 Kecamatan dan 22 desa seluruh Kabupaten Bojonegoro. Sehingga sangat bahaya jika mendirikan bangunan, rumah, toko di dekat aliran Sempadan Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro karena jenis tanah di Kabupaten Bojonegoro juga berpotensi terjadinya longsor.

Pasal 157, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 140, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dimaksud, yaitu:

”Setiap orang dilarang membangun, perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang”.

Disini yang harus bertindak tegas dalam penegakan sanksi pidana terhadap perumahan dan permukiman yang berada di Sempadan Sungai Bengawan Solo adalah aparat penegak hukum yaitu polisi, dan pamong praja serta harus adanya kordinasi dengan pemerintah daerah di Kabupaten Bojonegoro. Dengan begitu maka akan dapat merealisasikan penegakan sanksi pidana terhadap perumahan dan permukiman yang berada di Sempadan Sungai Bengawan Solo di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Dalam kenyataanya pemerintah daerah di Kabupaten Bojonegoro tidak

pernah ada koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk membahas masalah perumahan dan permukiman yang berada di Sempadan Sungai Bojonegoro yang setiap tahunnya jika musim penghujan datang air sungai akan meluap ke arah permukiman warga di sekitar Sempadan Sungai Bengawan Solo.

Polisi sebagai aparat penegak hukum dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mempunyai Tugas Pokok yaitu sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Bahwa dalam kasus yang terjadi disini perumahan dan permukiman yang berada di Sempadan Sungai Bengawan Solo bukan termasuk delik aduan artinya delik aduan terjadi apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.

Polisi di sini mengatakan bahwa penegakan hukum dalam suatu kasus yang bukan merupakan delik aduan seperti diatas, dapat dilakukan tindakan penegakan hukum secara preventif berarti berupa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan, kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa kongkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Kasus ini juga menyangkut pada lingkungan sekitar yang telah merusak fungsi tata guna lahan dan juga dapat dikenai dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, pada pasal 54 ayat (1) dan (2), yaitu:

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;

⁴ Hasil wawancara dengan Brigadir Ahmad Zainan Na'im, Anggota Reskrim Polres Kabupaten Bojonegoro, tanggal 4 November 2013, pukul 09:30 WIB, diolah

- b. remediasi;
- c. rehabilitasi;
- d. restorasi; dan/atau
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada lokasi penelitian juga terdapat pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah dari penduduk, dan hal tersebut akan merusak lingkungan yang ada di Sempadan Sungai Bengawan Solo Kabupaten Bojonegoro, serta rusaknya sistem drainase. Pemulihan lingkungan di Sempadan Sungai Bengawan Solo harus dilakukan oleh masyarakat yang bermukim di sekitarnya dengan cara penghentian pencemaran dan pembersihan serta perbaikan lingkungan yang berada di sekitar Sempadan Sungai Bengawan Solo.

Instrumen penting dalam penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan. Dengan demikian izin penegak hukum yang utama di sini adalah pejabat atau aparat pemerintah yang berwenang memberi izin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan yang mempengaruhi tata guna lahan. Penegakan hukum represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan.⁵

Menegakan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tujuan hukum yang meliputi kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus mendapatkan kompromi secara proporsional seimbang.⁶ Termasuk juga menegakan perumahan dan permukiman yang ada di Sempadan Sungai Bengawan Solo harus mengedepankan manfaat masyarakat, disini jelas masyarakat mendapatkan manfaat jika dilakukan penegakan yaitu terhindar dari bahaya bencana, karena sanksi yang diterapkan sudah pasti dalam Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada pasal 157. Tetapi hukum juga harus

⁵ Widia Edorita, Peranan Amdal dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara Asia Tenggara, 2007, hlm. 44

⁶ Ibid, hlm:146

berakhir adil dalam penerapannya, disini penegakan sanksi pidana harus adil untuk masyarakat.

Selanjutnya sesudah tujuan hukum menuju pada faktor yang terkait dengan sistem hukum yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence M Friedman, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum.⁷ Beberapa komponen tersebut termasuk bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Semua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat, sekaligus menertibkan masyarakat. Kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor yang lainnya.⁸ Jika peraturan hukum dan pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya sudah berjalan secara berdampingan, maka jika salah satu sistem kultur hukum yang tidak berjalan maka penegakan tidak akan berjalan dengan baik. Budaya masyarakat jika sudah membudaya tidak taat akan hukum atau terlalu menyepelekan dan tidak mau tahu akan hukum maka sistem tersebut belum bisa berjalan secara optimal.

Menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Drs. Kusbiyanto, kewenangan untuk menertibkan Permukiman di Sempadan Sungai Bengawan Solo disini lintas Kabupaten, karena tidak hanya di Kabupaten Bojonegoro saja, karena terkait dengan aset maka juga yang harus berperan yaitu Dinas Pekerjaan Umum Provinsi dan Balai Besar Bengawan Solo. Sementara ini yang ditertibkan oleh Satpol PP yaitu bangunan yang berada di atas tanggul saja yang bangunannya berupa warung-warung dan toko bersifat semi permanen. Penertiban permukiman oleh Satpol PP hanya bersifat persuasif yaitu melakukan pendekatan kepada warga yang sifatnya membujuk warga secara halus untuk memberikan informasi adanya larangan bermukim dan mendirikan bangunan di Sempadan Sungai Bengawan Solo. Untuk kasus bangunan semi permanen yang diatas tersebut jika Satpol PP sudah menggusurnya maka beberapa hari lagi sudah kembali lagi menempati atas tanggul

⁷ Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm: 154

⁸ Satjipto Raharjo, **Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.hlm: 9

kembali, untuk itu seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro harus mempunyai kebijakan atas hal tersebut.⁹

Dikatakan oleh Bapak Kusbiyanto di Kantor Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro sudah diadakan rapat dengan Balai Besar Sungai Bengawan Solo, Badan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro dan Pemerintah Bojonegoro membahas tentang Permukiman yang berada di Sempadan Sungai Bengawan Solo untuk segera dilakukan tindakan yang sigap dengan adanya relokasi pada permukiman tersebut, tidak hanya di Sepanjang Sungai Bengawan Solo artinya juga untuk semua sungai dan anak sungai di Kabupaten Bojonegoro. Disini Kabupaten Bojonegoro sudah melakukan wacana untuk kearah seperti yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta Jokowi terkait normalisasi Sungai Ciliwung Jakarta, yang warganya bermukim di Sempadan Sungai Ciliwung, tetapi disini memang Pemerintah Bojonegoro telah melakukan perencanaan dengan pihak-pihak terkait seperti Balai Besar Bengawan Solo, Badan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro dan Pemerintah Daerah Bojonegoro, karena menghuni daerah yang rawan bencana dilarang dalam Undang-Undang, tetapi belum menemukan titik temu dari rapat tersebut dan belum ada kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro lebih lanjutnya.¹⁰

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Tugas Pokok dan Fungsinya adalah melakukan perencanaan dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan urusan pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, energi dan sumber daya mineral, serta pariwisata Perencanaan Pembangunan Daerah Bojonegoro dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Daerah. Jadi peran dan serta perencanaan pembanngunan Daerah Bojonegoro untuk kawasan perumahan dan permukiman juga melibatkan BAPPEDA

⁹ Hasil wawancara, Drs Kusbiyanto, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bojonegoro, tanggal 11 Desember 2013, pukul 10:29 WIB, diolah

¹⁰ Ibid

dalam urusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Menurut Bapak Teguh Dwi Haryanto ST. MT, Kanit Bidang Fisik dan Prasarana di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bojonegoro, daerah Sempadan Sungai Bengawan Solo memang daerah yang rawan terjadi bencana, diantaranya banjir dan longsor, serta sebenarnya tidak boleh di dirikan bangunan pada ketentuan Perda RTRW Kabupaten Bojonegoro.¹¹

Rekomendasi untuk perencanaan pembangunan pada Kabupaten Bojonegoro perumahan dan permukiman di Sempadan Sungai Bengawan Solo seharusnya direlokasi ke tempat yang aman, karena ada ketentuan dari tepi sungai jarak 100 meter tidak boleh ada bangunan yang berdiri. Untuk relokasi juga memang tidak mudah dan membutuhkan biaya besar, maka dari itu APBD Kabupaten Bojonegoro harus mencukupi untuk diadakan program tersebut. Bangunan yang berada di sempadan Sungai Bengawan Solo ada bangunan yang lama dan juga ada bangunan yang baru, konsekuensinya untuk bangunan yang lama bisa dilakukan rekomendasi direlokasi atau di beri ganti rugi berupa uang lalu untuk bangunan yang baru harus dipindahkan atau dirobohkan dan tidak diberi ganti rugi berupa uang atau apapun. Kawasan Sempadan Sungai Bengawan Solo adalah kawasan lindung yang seharusnya bebas dari bangunan, kecuali untuk sarana yang mendukung keberlangsungan sungai tersebut. Contohnya bisa dibangun ruang terbuka hijau, taman, daerah resapan air, dan dapat ditanami pohon-pohon di tepi sungai untuk mencegah terjadinya longsor.¹²

Permukiman bantaran sungai merupakan squatters atau penghuni liar. Apabila menepati areal di dalam garis sempadan sungai, keberadaanya menjadi illegal karena peraturan perundangan dan terlarang karena pertimbangan keselamatan warga. Secara fisik memiliki segala atribut kumuh dan secara hukum tidak memiliki kekuatan dan kepastian dalam bermukim. Kawasan kumuh yang teridentifikasi di wilayah Kabupaten Bojonegoro pada umumnya berada di Perkotaan Bojonegoro, terutama

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Teguh Dwi Haryanto ST. MT, Kanit Bidang Fisik dan Prasarana di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bojonegoro, tanggal 30 Oktober 2013, pukul 13:00 WIB, diolah

¹² Ibid

pada kawasan-kawasan yang berdekatan dengan bantaran sungai Bengawan Solo. Beberapa lokasi kawasan kumuh di Perkotaan Bojonegoro antara lain sebagai berikut: Kelurahan Ledok Wetan, Kelurahan Ledok Kulon, Kelurahan Jetak, Desa Sukorejo, Kelurahan Klangon, Kelurahan Ngrowo, Kelurahan Karangpacar, Kelurahan Banjarjo, Desa Kauman, Kelurahan Kadipaten¹³

Dengan banyaknya kawasan kumuh dan secara hukum tidak memiliki kekuatan dan kepastian dalam bermukim maka untuk perijinan mendirikan bangunan rumah tinggal tidak sesuai dengan persyaratan perijinan yang benar dan legal.

Dasar hukum untuk Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Bojonegoro yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2011 tentang Restribusi Perijinan Tertentu dan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2010 tentang Persyaratan Perijinan dan Waktu Pelayanan Perijinan. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tinggal harus melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk memberikan rekomendasi mengenai tata ruang, Badan Lingkungan Hidup untuk memberikan rekomendasi pengelolaan lingkungan, setelah itu baru melalui Badan Perijinan. Jika sudah terpenuhi semua maka baru Badan Perijinan memberikan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).¹⁴

Berikut adalah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Rumah Tinggal:

1. Surat Permohonan
2. Gambar kontruksi bangunan lengkap dengan detail beserta perhitungan kontruksi dan gambar situasi (untuk bangunan rumah tinggal lebih dari satu lantai)
3. Foto copy sertifikat tanah/surat keterangan
4. Foto copy KTP
5. Surat persetujuan tetangga bagi bangunan bertingkat diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat
6. Surat pernyataan permohonan IMB, bahwa semua kerusakan yang diakibatkan oleh kekuatan kontruksi terhadap itu sendiri maupun bangunan itu sendiri maupun bangunan tetangga yang merugikan orang lain menjadi tanggung jawab pemilik bangunan bermetrai cukup

¹³ Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D) Kabupaten Bojonegoro, **BAB V Rencana Pemanfaatan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Bojonegoro**, hlm: 24-27

¹⁴ Hasil Wawancara, Bapak Abdul Aziz SH, Staf Sekertariat Untuk Pengurusan IMB Dinas Perijinan Kabupaten Bojonegoro, tanggal 1 oktober 2013, pukul 09:30 WIB, diolah

7. Surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri)
8. Pernyataan Permohonan ijin tentang kesanggupan memenuhi Perundang-undangan

Menurut Bapak Abdul Aziz, SH, Sekertariat Badan Perijinan Kabupaten Bojonegoro yang bertugas di bagian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) jika sudah terpenuhi syarat-syarat diatas maka akan dengan segera diproses perijinan untuk rumah tinggal tersebut. Sebaliknya jika ada syarat yang tidak terpenuhi maka perijinan tersebut tidak akan diproses. Beliau mengatakan bahwa jika ada pelanggaran dalam pendirian bangunan tanpa melalui Badan Perijinan dan tetap didirikan, maka yang harus menertibkan adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) jika Peraturan Daerah yang dipakai, tetapi jika mengacu kepada Undang-undang maka yang wajib menertibkan yaitu Polisi. Dalam hal ini akan terjadi tumpang tindih dalam hal penindakan rumah hunian yang menyalahi aturan Undang-undang maupun Peraturan Daerah.¹⁵

Menurut Bapak M.Z Budi Mulyono, Sekertariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro disini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hanya bertugas membantu jika ada yang terkena dampak bencana banjir dan longsor di permukiman yang berada di Sempadan Sungai Bengawan Solo. Disini beliau mengatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak dimintai pertimbangan dalam masalah pendirian bangunan di Sempadan Sungai Bengawan Solo yang berpotensi rawan bencana tersebut. Padahal disini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah mempunyai peta daerah Kabupaten Bojonegoro yang tidak boleh ditempati untuk bermukim. Seharusnya untuk pendirian bangunan di sekitar sempadan sungai harus memperhatikan kondisi fisik di sekitarnya apakah daerah tersebut aman atau rawan bencana atau tidak. Setiap musim penghujan datang dan air sungai meluap maka

¹⁵ Ibid

BPBD harus segera menyisir daerah-daerah yang dilalui Sungai Bengawan Solo dan member bantuan kepada korban yang rumahnya terkena banjir.¹⁶

Untuk membentuk kesadaran diri dari masyarakat yang berada di Sempadan Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro perlu adanya tindakan sosialisasi yang harus digerakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro. Jika masih belum adanya sosialisasi maka disini masyarakat tidak bisa disalahkan untuk hal ini, dikarenakan masyarakat tidak, semuanya mengetahui adanya pengaturan sanksi pada pasal 157 yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam penelitian langsung kepada masyarakat yang saya wawancarai ada 10 orang dengan berbeda latar belakang pendidikannya serta, berbeda keadaan ekonominya, disini peneliti tidak menemukan satu orangpun yang mengetahui akan pengaturan sanksi pidana yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Mereka mengetahui kondisi di tempat mereka bermukim kurang baik dari unsur kebersihannya, drainase yang buruk, tidak aman (sering terjadi banjir), dapat membahayakan semua orang jika banjir datang khususnya yang mempunyai anak kecil. Jika banjir datang biasanya dalam satu tahun 1 sampai 3 kali terjadinya banjir di tempat mereka tinggal dan ketinggian banjir mencapai 2 lebih, bahkan sampai ada yang sampai atap rumah mereka. Menurut mereka perbaikan lingkungan sungai hanya terjadi pada tanggul yang jebol akibat air Sungai Bengawan Solo meluap, tetapi untuk perbaikan lingkungan disekitar sungai seperti penanaman pohon atau membuat Ruang Terbuka hijau masih belum. Untuk sosialisasi dari Pemerintah memeang berupa ajakan yang bersifat persuasif saja, belum pernah diadakan sosialisasi yang memang sifatnya khusus untuk membicarakan tentang bahaya bermukim di Sempadan Solo.

¹⁶ Hasil wawancara, Bapak M.Z Budi Mulyono, Sekertariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro, tanggal 31 Oktober 2013, pukul 10:00 WIB, diolah

Pendapat mereka tentang setuju atau tidaknya diadakan relokasi, mereka masih berpikir panjang terlebih dahulu untuk menuju ke arah itu. Mereka mengatakan jika ganti rugi layak dan sepadan dengan rumah yang saya miliki seperti ini saya mau direlokasi, tetapi jika ganti rugi tidak cocok maka kami akan memikirkan terlebih dahulu. Ganti Rugi yang mereka pilih berupa uang yang sepadan untuh harga rumah mereka, karena dapat dibuat untuk membangun rumah di tanah yang legal. Mengenai sertifikat tanah ada yang mempunyai sertifikat ada yang belum mempunyai, yang mempunyai sertifikat tanah sebagian besar adalah rumah yang sifat bangunannya permanen, untuk yang belum ada sertifikat tanahnya yaitu bangunan rumah yang sifat bangunannya tidak permanen dan dimiliki oleh masyarakat kalangan ekonomi menengah kebawah.¹⁷

2. Kendala Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Perumahan dan Permukiman yang Berada di Sempadan Sungai Bengawan Solo Kabupaten Bojonegoro yang Berpotensi Menimbulkan Bencana

Kendala Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Perumahan dan Permukiman yang Berada di Sempadan Sungai Bengawan Solo Kabupaten Bojonegoro yang Berpotensi Menimbulkan Bencana yang dilakukan oleh Polisi yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Eksternal:

1. Kesadaran Masyarakat Yang Berada Di Sempadan Sungai Bengawan Solo

Kesadaran masyarakat ini harus dibangun dengan sosialisasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro kepada masyarakat yang tinggal di Sempadan Sungai Bengawan Solo, karena jika masih bermukim di Sempadan Sungai Bojonegoro sangat bahaya dan rawan akan terjadinya bencana banjir dan longsor. Kesadaran masyarakat ini akan timbul jika ada sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan sarana dan prasarana yang mendukung untuk tidak tinggal di Sempadan Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro.

¹⁷ Hasil Wawancara, 10 Masyarakat yang berada di Kelurahan Jetak, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Tanggal 3 November 2013, pukul 10:15 WIB, diolah

2. Perumahan dan Permukiman di Sempadan Sungai Bengawan Solo Sudah Ada Sebelum Undang-Undang Tersebut Dibuat dan Disahkan

Permukiman tersebut memang sudah ada sebelum Undang-Undang tersebut dibuat dan disahkan, hal tersebut dikemukakan oleh 10 (sepuluh) responden masyarakat yang tinggal di Kelurahan Jetak, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2031.

Wajib ditertibkan dan diberi tindakan tegas jika seseorang melanggar ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang yang dibuat dan disahkan tersebut. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah jika Polisi dan Satpol PP disini langsung bertindak sesuai dengan ketentuan sanksi yang ada di dalam Undang-Undang dan Perda, maka Polisi dan Satpol PP takut untuk melakukan hal ini karena dapat mengakibatkan hal yang buruk yaitu bentrok antar warga dan aparat.¹⁸

3. Lokasi Perumahan dan Permukiman

Lokasi adalah posisi yang menetapkan suatu tempat atau letak suatu bangunan atau orang berada. Faktor lokasi dalam hal ini adalah perumahan dan permukiman yang berada di Sempadan Sungai Bengawan Solo Kabupaten Bojonegoro yang dekat dengan akses kota meliputi pertokoan, pasar, perkantoran, dan pusat perekonomian yang berada di tengah kota. Akses yang sangat dekat dengan kota tersebut yang menjadi faktor masyarakat

¹⁸ Hasil Wawancara Brigadir Ahmad Zainan Nai'im (Reserse Kriminal Polres Bojonegoro) dan Drs Kusbiyanto, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bojonegoro, Tanggal 4 November 2013, pukul: 09:30 WIB dan Tanggal 11 Desember 2013, pukul: 10:29 WIB, diolah

bermukim di Sempadan Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro, karena memudahkan kegiatan sehari-hari.

b. Faktor Internal Dari Polres Kabupaten Bojonegoro:

1. Perlu Sosialisasi Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Kepada Warga Yang Tinggal Di Sempadan Sungai Bengawan Solo

Tidak adanya sosialisasi ini terlihat masih adanya permukiman yang berada di Sempadan Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro yang setiap tahunnya terkena bencana banjir. Sosialisasi terhadap masyarakat di Sempadan Sungai Bengawan Solo ini harus mulai dilakukan, karena jika belum dilakukan secara bertahap maka kesadaran masyarakat tidak akan berubah, mereka akan menganggap menempati bangunan di sekitar sungai itu tidak akan ada bahaya dan dampaknya.

2. Perlu Adanya Personil Penegak Hukum Di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Disini Brigadir Ahmad Zainan Na'im mengatakan menegaskan bahwa dalam menegakkan peraturan tentang tidak bolehnya ada bangunan di tepi sungai maka diperlukan personil yang paham mengenai peraturan perundang-undangan di bidang Perumahan dan Kawasan permukiman yang berpotensi menimbulkan bencana bagi rumah yang di huninya, sehingga personil penegak hukum tersebut dapat memberikan keputusan apakah suatu peristiwa dapat disebut sebagai pelanggaran atau tidak.

3. Perlu adanya koordinasi dan sosialisasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan Aparat Penegak Hukum

Disini menurut Brigadir Ahmad Zainan Na'im yang bertugas di bagian reserse Polres Bojonegoro, kendala penegakan sanksi pidana terhadap perumahan dan permukiman di Sempadan Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro ini belum ada kebijakan dari pemerintah daerah untuk menertibkan permukiman di Sempadan Sungai Bojonegoro walaupun ada Undang-Undang yang telah mengaturnya polisi disini tidak dapat melakukan penertiban berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang

Perumahan dan Kawasan Permukiman. Disini Pemerintah Daerah Kabupaten tidak pernah berkoordinasi dan mensosialisasikan kepada Kepolisian Resort Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan penegakan sanksi yang telah ada di dalam Undang-undang tersebut.¹⁹

c. Faktor Internal Dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro

1. Perlu Segera Dibuat Kebijakan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro

Menanggapi tentang penegakan sanksi pidana terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 maka perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan membuat Perda atau Kebijakan yang berkenaan tentang dilarangnya didirikan perumahan dan permukiman yang berada di Sempadan Sungai bengawan Solo Di Kabupaten Bojonegoro yang rawan bencana. Disini satpol pp tidak berani serta merta melihat Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro saja, tetapi juga menunggu kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dulu, karena satpol pp takut akan terjadi bentrok dengan warga yang bermukim di Sempadan Sungai Bengawan Solo.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

Penegakan sanksi pidana terhadap perumahan dan permukiman yang berada di Sempadan Sungai bengawan Solo ini masih sangat sulit di realisasikan atau belum dapat direalisasikan oleh Polisi, Satpol PP, maupun oleh Pemerintah Daerah. Penegakan hanya dilakukan oleh Satpol PP pada bangunan diatas tanggul saja dan tidak secara menyeluruh, dan kendala yang dihadapi dalam penegakan sanksi pidana terhadap perumahan dan permukiman yang berada di Sempadan Sungai bengawan Solo ini masih sangat banyak terkendalanya mengenai tidak adanya sosialisasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro kepada Warga yang tinggal di Sempadan

¹⁹ Hasil wawancara Brigadir Ahmad Zainan Nai'im, Reserse Kriminal Polres Bojonegoro, Tanggal 4 November 2013, pukul 09:30, diolah

Sungai Bengawan Solo, tidak adanya personil penegak hukum di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, tidak adanya koordinasi dan sosialisasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan Aparat Penegak Hukum, serta kesadaran masyarakat yang kurang tanggap akan bahaya bermukim di Sempadan Sungai Bengawan Solo.

A. Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Bagi Pemerintah Daerah atau Instansi yang terkait

Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro membuat kebijakan yang melarang adanya bangunan dan permukiman di Sempadan Sungai Bengawan Solo, melakukan koordinasi dan sosialisai antara Pemerintah Daerah dan Aparat penegak hukum, melakukan sosialisasi terkait ancaman bencana banjir Sungai Bengawan Solo yang terjadi sewaktu-waktu khususnya pada daerah rawan bencana, membentuk personil penegak hukum di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, melakukan pengawasan dan memonitoring terhadap pemanfaatan lahan di Sempdan Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro.

2. Bagi Masyarakat yang berada di Sempadan Sungai Bengawan Solo

Daerah sempadan sungai atau bantaran sungai harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berpartisipasi untuk menjaga dan memelihara serta meningkatkan kelestarian fungsi dari sempadan sungai dan tanggul, dan meningkatkan rasa kesadaran terhadap ancaman bencana atau bahaya bermukim di sempadan sungai, khususnya di Kabupaten Bojonegoro.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah dan I Wayan Suandra, dan B.A Manalu, **Dasar-dasar Hukum Perumahan**, Rineka Cipta, Jakarta. 1990.

Widia Edorita, Peranan Amdal dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara Asia Tenggara, 2007.

Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Satjipto Raharjo, **Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Majalah

Bappenas, **Identifikasi Masalah Pengelolaan Sumber Daya Air Di Pulau Jawa**, Direktorat Aparatur Negara, Jakarta, 2006

Undang-Undang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2031

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D) Kabupaten Bojonegoro

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2031

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Internet

Rohman Taufiq, Banjir Bojonegoro Banjir Terbesar Tahun Ini, 2007, (Online), <http://www.tempo.co/read/news/2007/12/30/058114460/>, diakses tanggal 1 Maret 2013